

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Suatu pesatnya perkembangan Teknologi dan informasi. Pajak secara umum pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Suatu keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi untuk membangun dan memajukan daerahnya tersebut. Subsidi ini diberikan berdasarkan suatu anggaran pendapatan yang sumbernya dari pajak. Pajak bermanfaat sekali bagi pembangunan nasional dan infrastruktur daerah. Hasil pajak yang dipungut tidak saja berfungsi dengan baik sebagai sumber pendanaan dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara melainkan sebagai alat untuk mengatur suatu kebijakan pemerintah bersifat ekonomi dan sosial.

Dalam suatu rangka pemerintah meningkatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal serta menaikkan pendapatan asli kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan selalu mendukung program yang diselenggarakan pemerintah diperlukan dana yang cukup besar serta peran masyarakat yang mendukung karena pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi-kondisi masyarakat daerah, Hal ini berdasarkan undang-undang otonomi daerah Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan suatu usaha

maupun yang disediakan pokok usaha yang menyediakan kendaraan roda dua maupun roda empat yang kita ketahui tempat parkir sangat kita perlukan untuk meletakkan kendaraan yang kita bawa untuk diparkirkan ditempat yang sudah disediakan dan untuk menjaga kendaraan yang kita bawa. Di kota Surabaya sendiri sektor pajak sangatlah besar itu terbukti kota besar Nomor 2 yang mayoritas penduduknya sangat padat, apalagi Surabaya bukan ibukota tapi pendapatan asli Surabaya sudah sangat besar dibandingkan tingkat ibukota atau tingkat provinsi seperti Jakarta yang menjadi PAD dari sektor pajak itu sendiri Surabaya sudah mengoptimalakan PAD yang pajak tiap tahunnya. Pusat suatu pembelian atau tempat umum memerlukan tempat untuk parkir bagi konsumen parkir yang salah satunya menjamin keamanan bagi konsumen itu sendiri. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Menurut Waluyo 2013:2).

Pengertian pajak parkir menurut Rochmat Soemitro (2003:5) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan untuk membayar pengeluaran umum.

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

- a. Untuk mengetahui system pungutan pajak parkir di wilayah kota Surabaya.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang pengaruhi penerimaan oleh pajak parkir.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

Penulis ingin mengetahui mekanisme pemungutan pajak parkir di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah (BPKBD) Kota Surabaya sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap MEKNISME PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH KOTA SURABAYA .

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

- a) Metode observasi Penulis akan melakukan pengamatan langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta melakukan pencatatan, pengamatan, mendengar dan meneliti bagaimana tentang pemungutan pajak parkir pada dinas pendapatan kota Surabaya.
- b) Metode wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab

kepada pembimbing eksternal secara langsung yang berkompeten dilapangan.

- c) Metode dokumentasi mencari data mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya serta penulis melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

